

**KINERJA POLITIK PEMERINTAHAN DESA (STUDI
TERHADAP PERBAIKAN JALAN DESA DI DESA BARAYA
KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO)**



Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar
Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Jurusan Ilmu Politik
Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik
UIN Alauddin Makassar*

Oleh :

MUH ISMAIL
30600112039

**FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh Ismail
NIM : 30600112039
Tempat/Tgl. Lahir : Bangkeng Nunu, 3 Juni 1993
Jurusan/Prodi : Ilmu Politik
Fakultas/Program : Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Alamat : Bangkeng Nunu, Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto
Judul : **“Kinerja Politik Pemerintahan Desa (Studi Terhadap Perbaikan Jalan Desa di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 2 Desember 2016

Yang menyatakan,



Muh Ismail
30600112039

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Kinerja Politik Pemerintahan Desa (Studi Terhadap Perbaikan Jalan Desa di Desa Baraya Kecamatan Bontoramaba Kabupaten Jeneponto)”, yang disusun oleh Muh Ismail, NIM : 30600112039, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at 2 Desember 2016 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Jurusan Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan)*

Samata-Gowa 2 Desember 2016

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. H. Muh Natsir MA
Sekretaris : Syahrir Karim, S.Ag, M.Si, Ph.D.
Munaqisy I : Drs. H. Ibrahim, M.Pd
Munaqisy II : Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si
Pembimbing I : Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si
Pembimbing II : Syamsul Asri, S.IP, M.Fil.I



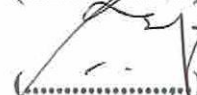
(.....)



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ushuluddin
Filsafat dan Politik
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Muh Natsir, MA.
Nip. 19590704 198903 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah *alhamdulillah*, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kepada kita beberapa nikmat, terutama kepada penulis berupa nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil karya berupa skripsi yang telah penulis rampungkan. Judul skripsi ini **“Kinerja Politik Pemerintahan Desa (Studi Terhadap Perbaikan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto)”** dimana didalamnya menguraikan tentang bagaimana kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur jalan dan apa faktor yang menghambat kinerja kepala desa. Penulisan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan di perguruan tinggi Strata satu (S1) pada program studi, jurusan Ilmu Politik, fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dan tak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita ialah Nabiullah Muhammad SAW, sebagai nabi pembawa kebenaran untuk mencerdaskan ummatnya dari zaman kejahilnaan menuju zaman yang berperadaban saat ini, atau dengan kata lain *“minazzulumaati ilannuur”*

Penulisan sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak beberapa kekurangan dan kesalahan yang dikarenakan atas keterbatasan pengetahuan dan referensi ilmu yang dimiliki penulis, karena penulis juga

merupakan makhluk biasa yang tak pernah luput dari kekhilafan yang sadar atas keterbatasan yang dimilikinya. Oleh karena itu, penulis menghimbau kepada pembaca agar kiranya memberikan saran dan kritikan yang sifatnya membangun untuk perbaikan kualitas hasil karya skripsi ini, dan penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca yang telah menyempatkan diri untuk membaca dan memberikan masukan serta saran dan kritiknya.

Penulis sadar bahwa berbagai telah banyak membantu dan memberikan arahan bagi penulis dan merampungkan karya skripsi ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, kesehatan jasmani, dan rohani serta keselamatan.
2. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi penulis
3. Ayahanda Badiheng Dg Lalang dan Ibunda Narti Dg Ke'ng yang tercinta dan tersayang, terima kasih atas Do'a dan dukungannya selama penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pabbari, M.Si selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6. Bapak Syahrir Karim, M.Si. Ph.d sebagai sekretaris jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar

7. Ibu Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si selaku pembimbing pertama dan pak Syamsul Asri, S.IP, M.Fil.I selaku pembimbing dua. dengan segala keikhlasannya dan kesabarannya, serta kesediaanya yang telah memberikan waktu, arahan, motivasi, bimbingan dan ilmu yang tak terhitung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Drs. Ibrahim, M.Pd selaku penguji pertama dan Ibu Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si selaku penguji kedua
9. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik yang telah memberi bekal dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan
10. Kepala Desa Baraya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan Seluruh masyarakat desa Baraya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Kepada seluruh keluarga besarku yang telah memberikan bantuan moril dan material serta do'a restu sejak awal melaksanakan studi ini sampai akhir. Ponakanku Kr Rewa Beserta istrinya Mbak Itha yang telah banyak membantu dan mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik Nasrun Amrullah, Nurfatimah K, S.IP, Siti Hajar, S.IP, Sri Maulinda serta seluruh Ilmu politik Angkatan 2012 UIN Alauddin Makassar, serta Teman-teman UKM KSR-PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar

13. Teman-teman yang ada diluar kampus Kak Reno, Kak Ikhsan, Ariska, serta sahabat-sahabatku Jusra Rosmmaeni, Iin Indaryanti Hasmul, Wahdaniar yang selalu memberi semangat kepada penulis.

Terima kasih semuanya atas segala bentuk cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, penulis selalu berdo'a agar kalian semua sehat selalu dan segala amal kebbaikannya dalam mendukung serta membimbing dapat Allah membalasnya dengan kebaikan kalian amin. Kiranya skripsi ini menjadi awal pesembahan pengabdian penulis kepada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya untuk keluarga yang tercinta.

Penulis dengan harapan agar skripsi ini mendapat perhatian berkelanjutan dengan memberi arahan, saran bahwa kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Samata-Gowa, 2 Desember 2016

Penulis

Muh Ismail
30600112039

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian	23
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	29
A. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto	29
B. Gambaran Umum Desa Baraya	30
C. Kependudukan	30
D. Pertumbuhan Ekonomi.....	31
E. Pendidikan.....	33
F. Agama	33
G. Kesehatan	34

H. Sosial Budaya.....	34
I. Musim	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN	36
A. Dinamika Politik pemerintahan Desa di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto	36
B. Faktor Penghambat Dalam Perbaikan Jalan Desa di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto	45
a). Faktor Penghambat.....	45
1. Kurangnya Perhatian dari Birokrat Desa	45
2. Kepemimpinan Yang Lemah	49
3. Tidak Tersedianya Lahan Untuk Pembuatan Jalan	52
b). Faktor Pendukung	53
BAB IV PENUTUP	57
A. KESIMPULAN	57
B. IMPLIKASI PENELITIAN	58
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Desa Baraya	34
---	----

Abstrak

Nama penyusun : MUH. ISMAIL

Nim : 30600112039

Jurusan : ILMU POLITIK

**Judul skripsi : KINERJA POLITIK PEMERINTAH DESA (STUDI
TERHADAP PERBAIKAN JALAN DESA DI DESA
BARAYA, KECAMATAN BONTORAMBA,
KABUPATEN JENEPONTO)**

Skripsi ini mengkaji tentang Kinerja Politik Pemerintahan Desa (studi terhadap perbaikan jalan desa di desa Baraya Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Dinamika Politik Perbaikan Jalan desa di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dan Apa faktor penghambat dalam perbaikan jalan desa di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif dengan pengumpulan data secara primer yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan secara sekunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal, laporan tahunan dan situs internet yang terkait topik penelitian.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan belum maksimal, kondisi ini diketahui dari banyaknya keluhan dari masyarakat akan kinerja kepala desa. Selanjutnya mengenai faktor yang menghambat kinerja pembangunan infrastruktur jalan di desa Baraya yaitu kurangnya perhatian dari birokrasi desa serta faktor lain itu faktor kesehatan yang dialami oleh kepala desa Baraya selama menjabat sebagai kepala desa sering terganggu sehingga kepala desa kurang bisa mengkoordinir bawahannya sehingga kurang maksimal dalam memimpin desa Baraya, serta tidak tersedianya lahan/tanah atau masyarakat yang enggan memberikan seikit lahan/tanah mereka untuk di gunakan sebagai pembuatan/perbaikana jalan desa. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu masyarakat yang antusias membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika mendengar kata birokrasi maka langsung yang ada dalam pikiran adalah bahwasanya kita berhadapan dengan suatu prosedur yang berbelit-belit, dari meja satu ke meja yang lainnya yang ujung-ujungnya adalah biaya yang serba mahal.¹ Berdasarkan pengertian birokrasi yang menyatakan bahwa birokrasi merupakan organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi dan dibentuk untuk memaksimalkan efisiensi administrasi dalam pemerintahan dan pembangunan yang menyangkut kelembagaan, aparat sistem prosedur dalam melaksanakan kegiatan demi kepentingan umum atau masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut yang terdiri dari kelembagaan, aparat, sistem, dan prosedur merupakan suatu kelompok khusus dalam masyarakat yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, selain itu juga sebagai suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan arena itu mempunyai tanggung jawab yang khusus.²

Permasalahan birokrasi yang paling mendasar adalah pemerintah terlalu sering memberikan keputusan publik yang kurang akurat dan dikeluarkan pada waktu yang tidak tepat. Selain itu, birokrasi pun sering dituding inefisiensi (korupsi) yang ditunjukkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

¹ A. Rahman, *sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, h. 169

² A. Rahman, *sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, h. 173

(APBN) dengan porsi belanja birokrasi lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja pembangunan. Kondisi ini tentu tidak dapat di biarkan bahkan harus segera mendapatkan prioritas dalam penataan penyelenggaraan kenegaraan.³

Salah satu yang menghambat daya saing Indonesia adalah permasalahan Infrastruktur. Berbicara mengenai infrastruktur tentu saja kita harus melihat dari segi kecukupan/kuantitas, kualitas dan cakupan/*coverage* dari Infrastruktur itu sendiri. Termasuk sisi *coverage* adalah pemerataan infrastruktur diseluruh wilayah Indonesia, dari sabang sampai merauke. Salah satu infrastruktur dasar yang utama adalah jalan raya. Menurut Pasal 9 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, berdasarkan statusnya Jalan Umum dikelompokkan menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa.⁴ Kerusakan jalan ini telah menimbulkan yang berkaitan dengan keberfungsian infrastruktur. Secara kasat mata, kerusakan jalan ini menghambat proses-proses pembangunan, sehingga turut serta merintang agenda menyeluruh memajukan perekonomian masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Hal yang harus dipikirkan adalah kita harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Karena ini merupakan sebuah kemampuan sebuah bangsa dalam

³Aggriani Alamsyah, *Etika Politik*, Uin Alauddin Makassar 2012, h 166

⁴https://www.minerba.esdm.go.id/library/sjih/PP3406_%20Jalan.pdf, di akses 30 agustus

melaksanakan pembangunan. Sering kali kita melihat jalan rusak, gedung tidak terurus, jembatan yang rusak, akses jalan ke tol macet total. Ini adalah gambaran yang sangat buruk dan tidak bisa terus-menerus terjadi, karena orang luar negeri akan menilai kemampuan kita dalam mengelola sebuah.

Demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan kesejahteraan rakyat yang di batasi pada usaha atau bekerja sebagai titik tolak pemilihan ayat yang di bahas adalah. QS. Al-Taubah ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِسِيرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّوكَ إِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya :

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya kita harus bekerja sesuai dengan jalan Allah karena kelak amal perbuatan kita sendiri kelak akan diperhadapkan kepada Allah SWT. Begitupun dengan kinerja pemerintah desa apabila dia melaksanakannya sesuai dengan yang seharsunya maka amalan yang di dapatkan setimpal dengan apa yang dia lakukan.

⁵Al-Qur'an & Terjemahanny, 2014 Departement Agama RI, Al-Hikmah, (Bandung : Cv Penerbit Diponegoro, 2010)

Dalam ayat lainpun di jelaskan tentang pentingnya amanat yang harus dipegang oleh seseorang begitupun dengan seorang pemimpin yaitu QS. Al-Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا ءَمَنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

Segala sesuatu yang ada dalam genggaman manusia adalah amanat Allah SWT. Agama adalah amanat Allah, bumi dan segala isisnya adalah amanat Allah, keluarga dan anak-anak adalah amanat Allah, bahkan jiwa dan raga manusia bersama potensi yang melekat pada dirinya adalah amanat Allah SWT. Semua harus dipelihara dan dikembangkan. Amanat manusia terhadap manusia menyangkut banyak hal, bukan hannya harta benda yang dititpkan atau ikatan perjanjian yang disepakati, tatapi termasuk juga rahasia yang dibisikkan.

Takhuunuu/mengkhianati oleh Al-BiqaaI dipahami sebagai isyarat bahwa khianat kepada Allah berbeda pada khianat selainNya. Khianat kepada Allah bersifat hakiki karena segala sesuatu, termasuk apa yang diamatkan oleh manusia kepada manusia lain, bersumber dariNya, sedangkan khianat kepada selainNya bersifat majaazi. Demikian yang ditulis oleh Al-Baaqi. Karena itu

pengulangan bertujuan mengisyaratkan bahwa pengkhianatan amanat manusia tidak lebih kecil dosanya dan tidak lebih kurang dampak buruknya daripada mengkhianati Allah dan RasulNya.

Amaanaatikum/mengkhianati amanat-amant kamu sebagai satu kesatuan yang berkaitan dengan khianat kepada Allah dan RasulNya. Ada amanat Allah kepada manusia, seperti hokum-hukum yang disyariatkanNya agar dilaksanakan. Ada amanat Rasul SAW kepada manusia, seperti keteladanan yang beliau tampilkan, ada amanat antar sesama manusia, seperti penitipan harta benda dan rahasia. Adalagi yang merupakan amanat bersama-Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin-yaitu persoalan-pesoalan yang dititipkan Allah dan dilakukan Rasul SAW dan diraih manfaatnya oleh kaum mukminin. Amanat ini melahirkan kemaslahatan masyarakat. Ini anatar lain seperti rahasia militer atau politik yang bila dibocorkan dapat merugikan kaum muslimin juga melanggar hak Allah dan RasulNya. Firman-Nya wa antum talamuun /sedang kamu mengetahui dipahami oleh ThabaathabaaI sebagai bertujuan untuk membangkitkan fitrah dan rasa kepedulian yang muncul dari lubuk hati mitra bicara agar menghindari khianat itu. Dan bukanlah syarat larangan berkhianat.

Ada yang memahami penggalan ayat terakhir diatas sebagai bentuk toleransi melakukan khianat dalam artian boleh berkhianat jika tidak sadar akibat buruknya dan tidak boleh berkhianat jika sadar akan akibat buruknya.

Lalu ada yang memahami penggalan tersebut sebagai larangan dan seorang mukmin mengetahui bahwa khianat terhadap amanat adalah haram.

Dalam pelaksanaan sering kali kita temui kendala khususnya pada pembangunan yang bersifat fisik, misalnya, seringkali para pihak yang terlibat dalam proses pembangunan mengabaikan masalah lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan baik pada saat perencanaan maupun pada saat pengoperasiannya, hal ini karena pihak- pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan tersebut lebih mengutamakan hasil atau produk dari pembangunan itu sendiri, sementara dampaknya terhadap lingkungan masih diabaikan. Belum lagi terkadang dana yang seharusnya dianggarkan untuk pembangunan jalan dan jembatan sudah ditetapkan, masih saja di manfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadinya.

Dalam hadistpun dijelaskan bahwa :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ
رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ
مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ
فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya :

Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal hal yang dipimpinnya. (buchary, muslim)

Hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggun jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Buruknya birokrasi tentu saja berimbas pada pelayanan, hal ini akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan rusaknya moral dan mental aparat itu sendiri. Birokrasi di Indonesia semakin runyam akibat dari penerapan prinsip birokrasi yang disalah artikan dan akan mengalami distorasi. Gambaran akibat dari buruknya birokrasi yang terjadi saat ini menimbulkan berbagai akibat yaitu:

1. Hierarki yang kaku berakibat birokrasi pelaksanaan kehilangan inisiatif dan lamban memberikan respon walau dalam keadaan urban, jika tidak di gerakkan oleh atasan mereka.
2. Aturan tumpah tindih dan terlalu mencurigai berdampak mematikan inisiatif masyarakat.
3. Kualitas pelayanan masyarakat belum efisien akibat tidak jelasnya standar berapa lama waktu dan berapa biaya pelayanan yang sesungguhnya.
4. Birokrasi terlalu gemuk sebagai akibat warisan politik masa lalu, hubungan yang hierarkis yang kaku, tidak mampu membedakan tingkat urgensi setiap urusan.⁶

Disisi lain, infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan didalam pembangunan infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien.⁷

Kurangnya pembangunan Infrastruktur yang terjadi di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto seperti perbaikan jalan yang menyebabkan banyak keluhan dari masyarakat sekitar. Banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa kinerja para pemerintah desa dalam mengatasi

⁶ Anggriani Alamsyah, *Etika Politik*, Uin Alauddin Makassar 2012, h. 166

⁷ Agus Suriadi, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Diktat 2005), h. 61

pembangunan infrastruktur ini belum maksimal, sedangkan pemerintah telah berjalan selama kurang lebih selama 3 tahun.

Jalan di Desaini memang cukup memprihatinkan apabila musim hujan datang maka ada sebagian jalan akan tergenang air, banyak pula jalan yang memiliki lubang yang cukup besar, dan licin, sedangkan ini merupakan jalan utama jalan utama yang menjadi tujuan masyarakat keluar masuk dari desa tersebut. Pemerintah desa nampaknya kurang menangani hal ini karenanya peneliti tertarik untuk mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi, apa saja kendala yang ada sehingga selama ini, jalan tersebut tidak pernah mengalami perbaikan, maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Kinerja Politik Pemerintahan Desa (Studi Terhadap Perbaikan Jalan desa di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang, penelitian yang berfokus pada “Kinerja politik Pemerintahan Desa (Studi Terhadap Perbaikan Jalan Desa di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto)” maka penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui.

1. Bagaimana kinerja politik pemerintahan desa terhadap perbaikan jalan desa di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam perbaikan jalan desa di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Secara umum dalam suatu penelitian itu tidak akan terlepas maksud dari tujuan dan manfaat penelitian tersebut. Begitu pula dengan proposal yang dilakukan oleh penulis terkait dengan Kinerja Politik Pemerintahan Desa (Studi Terhadap Perbaikan Jalan desa di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto): yaitu

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Politik Pemerintahan desa dalam perbaikan jalan Desa di Desa Baraya, kecamatan Bontoramba, kabupaten jeneponto.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung dalam perbaikan jalan desa di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara akademisi

- 1) penelitian ini berguna bagi pembaca khususnya di bidang ilmu politik, karena penelitian ini menjelaskan tentang Kinerja Politik Pemerintahan Desa (Studi Terhadap Perbaikan Jalan Desa di Desa Baraya, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto).
- 2) Adanya penelitian ini pula, di harapkan mampu membantu proses pembelajaran secara akademik dalam lingkungan kampus terutama fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik khususnya di

bidang ilmu politik terhadap studi tentang Kinerja Politik Pemerintah Desa (Studi Terhadap Perbaikan Jalan Desa di Desa Baraya, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto).

b. Secara praktis

- 1) Dalam penelitian ini di harapkan juga bisa berguna bagi para penentu program Negara sebagai masukan yang berharga dan bersifat ilmiah dalam mengawal program pemerintah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaku politik tentang pentingnya meningkatkan Infrastruktur pembangunan khususnya didesa Baraya.

D. KAJIAN PUSTAKA

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis mengenai judul ini ada beberapa yang telah melakukan penelitian terkait politik pembangunan infrastruktur.

“Politik Anggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto” Oleh Sudarni. Mekanisme pengelolaan anggaran infrastruktur didesa Bululoe berasal dari APBDes kemudian dilanjutkan pada perencanaan penganggaran kegiatan melalui RKPDes, setelah itu dirembungkan ke SKPDes untuk selanjutnya di musyawarahkan dalam musrembang, setelah diserahkan kepada kelurahan atau desa (pemerintah setempat), untuk kemudian disalurkan ketiap-tiap dusun.

Namun dalam prosesnya pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur di desa Bululoe tidak berjalan dengan sesuai peruntukannya. Hal ini karena adanya kepentingan elit politik dalam proses pengalokasian anggaran, belum lagi banyaknya pungutan yang membebani masyarakat. Selanjutnya mengenai respon masyarakat terkait implementasi pembangunan infrastruktur di desa Bululoe, sebagian masyarakat masih belum puas karena beberapa program pembangunan khususnya perbaikan infrastruktur hingga saat ini belum terealisasi. Mereka berpandangan bahwa anggaran yang dimaksud sudah di alokasikan untuk pembangunan desa belum bias di nikmati hasilnya. Terutama akses jalan layak yang mereka sangat butuhkan selama 9 tahun terakhir ini tampak terabaikan oleh pemerintah. Kebijakan politisi yang hanya mempekerjakan kalangan yang pro kepala desa dipandang menjadi penghalang bagi kebijakan-kebijakan taktis pemerintah yang pro rakyat. Pembangunan infrastruktur juga masih kurang baik padahal anggaran seharusnya merujuk pada kesejahteraan masyarakat meskipun belum adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah setempat.⁸

“Peran Kepala Desa Kanjilo Dalam Memperdayakan Masyarakat di Bidang Pembangunan” Oleh Djen Ahmad Idrus. Penelitian ini menjelaskan tentang peran pemerintah desa Kanjilo dalam mendorong pembangunan di bidang infrastruktur desa apa lagi diberlakukannya, setiap pemerintah desa

⁸Sudarni, Politik Anggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. *Skripsi*. (Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015). h. xxi

memiliki kewenangan dalam mengatur pembangunan, seperti pemerintah desa memiliki peran dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di desa masyarakat didesa, yang dilalui melalui pesan-pesan infrastruktur desa, pengarah terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa. Berkaitan dengan penelitian ini yang mencoba mendriskripsikan peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Faktor-faktor penghambat dalam pemberdayaan Masyarakat desa di bidang infrastruktur desa Kanjilo yaitu : kurangnya fasilitas sarana da prasarana sanagant menghambat kinerja pemerintah demi terselenggaraanya pembangunan. Sarana perhubungan yang kurang memadai ini masih di keluhkan oleh pemerintah desa seperti kurang dana yang dialokasikan untuk desa dan belum di keluarkannya kebijakan dari pemerintah daerah tentang peralihan lahan pertanian menjadi lahan industry dan bisnis.⁹

“Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat”. Oleh Andi Asnudin. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pelibatan masyarakat dalam proses Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan (PIIP) Tahun 2009 dan dampak yang ditimbulkan, serta data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk pembelajaran pada

⁹Djen Ahmad Idrus, Peran Kepala Desa Kanjilo Dalam Memperdayakan Masyarakat di Bidang Pembangunan Infrastruktur desa, *Skripsi*, jurusan ilmu politik fakultas Ushuluddin, Filsafat dan politik (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015). h. xxi

kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan menggunakan full populasi, yaitu: di sejumlah 25 desa sasaran PPIP Propinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek pembangunan infrastruktur perdesaan sekalipun cukup fungsional dan masyarakat puas dengan kinerja teknisnya, namun masih rendah tingkat keberlanjutannya. Karena itu, dibutuhkan fokus perhatian proyek pada masa yang akan datang, seperti (1) meningkatkan aspek pengorganisasian masyarakat, (2) transparansi, dan (3) akuntabel, serta (4) berkelanjutan. Proyek pembangunan infrastruktur perdesaan akan semakin efektif dalam mendorong pembangunan masyarakat dan wilayah pedesaan, manakala diikuti dengan program penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan ekonomi rakyat untuk mendorong kesejahteraan. Termasuk mulai memperhatikan program infrastruktur lingkungan di masyarakat (pengolahan limbah, perlindungan sumber air, dll)¹⁰

“Peranan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Citta, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng”. Oleh Luqman. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepala desa sangat berperan dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ini sesuai peranannya sebagai motivator, dinamisator, dan

¹⁰ Andi Asnudin, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat, Volume 7 nomor 4, *jurnal*, November 2009, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTTEK/article/viewFile/598/518>

katalisator dalam masyarakat yang terimplementasikan dalam bentuk pemberian penyuluhan, (penerangan), pemberian perintah(arahan), serta pemberian bantuan barang/fasilitas. Usaha tersebut dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang arti penting masyarakat dalam pembangunan sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk terlibat dalam setiap program pembangunan. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi peningkatan masyarakat dalam pembangunan yaitu di pengaruhi olehfaktor kepemimpinan dari kepala desa, tingkat pengetahuan masyarakat (pendidikan) dan pekerjaan (pendapatan) serta kesadaran dari masyarakat.¹¹

“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Perkembangan Wilayah di Indonesia”. Oleh Fika Novitasari, Sri Maryati. Kemajuan ekonomi juga telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin tidak saja dalam peningkatan pendapatan per kapita, namun juga dalam perbaikan berbagai indikator sosial dan ekonomi lainnya termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan wilayah di Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki isu yang sama dengan kasus studi di Negara lain seperti India dan Cina, yaitu kesenjangan wilayah atau disparitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketimpangan antara output di beberapa wilayah Indonesia yang dicerminkan terhadap Produk Domestik Rasional Bruto (PDRB) wilayah. Tantangan lain dari suatu negara besar seperti Indonesia

¹¹Luqman. Peranan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Citta Keamatan Liliraja, Kab. Soppeng, *Skripsi*, (jurusan Ilmu pemerintahan fakultas ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 2007). h. xii

adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Di Indonesia, belum banyak dilakukan penelitian mengenai hubungan pengaruh infrastruktur terhadap perkembangan wilayah, khususnya jika dihubungkan dengan kesenjangan wilayah. Upaya yang dapat dilakukan terhadap faktor-faktor infrastruktur yang signifikan mempengaruhi karakteristik perkembangan wilayah di Indonesia. Seperti di wilayah yang memiliki pertumbuhan Produk Domestik Rasional Bruto (PDRB) per kapita rendah, maka dapat dilakukan intervensi terhadap pertumbuhan panjang jalan nasional, misalnya dengan menambah insentif untuk pembangunan panjang jalan nasional atau melakukan perbaikan terhadap pembangunan panjang jalan nasional di wilayah dengan tingkat perkembangan Produk Domestik Rasional Bruto (PDRB) rendah.¹²

Perbedaan skripsi ini dengan tulisan lainnya adalah, skripsi ini pendekatan yang digunakan dalam melihat penyelenggaraan pemerintah desa yakni menggunakan pendekatan kinerja politik.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

a. Birokrasi

Birokrasi yang dalam bahasa Inggris, *Bureaucracy*, berasal dari kata *bureau* (berarti: meja) dan *cratin* (berarti: kekuasaan), dimaksudkan adalah kekuasaan berada pada orang-orang yang berada di belakang meja. Sedangkan menurut Blau dan Page (1956) mengemukakan birokrasi “sebagai tipe dari

¹² Fika Novitasari, Sri Maryati, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Perkembangan Wilayah di Indonesia, Volume 3 Nomor 2, *Jurnal*, Juli 2014, <http://sappk.itb.ac.id/jpwk2/?p=1633>, 13 Agustus 2016

suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrative yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang. Jadi menurut Blau dan Page, birokrasi justru untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang di tunjukkan untuk meningkatkan efisiensi administratif, meskipun kadangkala di dalam pelaksanaannya birokrasi seringkali mengakibatkan adanya ketidakefisienan.¹³

Seperti yang di nyatakan oleh *Blau* dan *Page*, bahwa birokrasi dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang benar. Hal itu hanya dapat berlaku pada organisasi besar seperti organisasi pemerintahan karena pada organisasi pemerintahan segala sesuatunya di atur secara formal, sedangkan pada organisasi kecil hanya di perlukan hubungan informal.¹⁴

Berdasarkan pengertian birokrasi yang menyatakan bahwa birokrasi merupakan organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi dan di bentuk untuk memaksimumkan efisiensi administrasi dalam pemerintah dan pembangunan yang menyangkut kelembagaan, aparat, sistem dan prosedur dalam melaksanakan kegiatan demi kepentingan umum atau masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut yang terdiri dari kelembagaan, aparat, sistem dan prosedur merupakan suatu kelompok khusus dalam masyarakat yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, selain itu juga sebagai suatu kelompok yang

¹³A. Rahman, *system Politik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, h. 169

¹⁴A. Rahman, *system Politik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, h. 172

mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai dan karena itu mempunyai tanggung jawab yang khusus.¹⁵

Birokrasi sejak lama menunggu dan selalu mempertanyakan peran Negara yang kurang optimal dalam memenuhi kewajibannya guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Bahkan rakyat merasa semakin jauh untuk mendapat keadilan dari Negara, ketika pada saat yang sama rakyat harus membayar sejumlah biaya yang tidak sedikit dalam pengurusan hak-hak sipil seperti bukti kependudukan, pernikahan, perceraian, akta kelahiran, pendidikan, dan kesehatan. Begitu pula, dengan pengurusan perijinan, baik untuk berusaha maupun untuk tempat tinggal tidak luput dari kewajiban untuk membayar sejumlah biaya.¹⁶

b. Kinerja

Bernardin dan russel memberikan pengertian kinerja sebagai *'performances is defined as the record of oatcomesproduce on a specified job function or aktifity during time periode*. Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan dalam kurun waktu tertentu .menurut Gibson *job performance* adalah hasil pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi. Sementara menurut Ilias kinerja adalah penampilan hasil kerja personil ataupun organisasi , penampilan hasil karya

¹⁵A. Rahman, *sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, h. 173

¹⁶Aggriani Alamsyah, *Etika Politik*, Uin Alauddin Makassar 2012, h. 165

tidak terbatas kepada personil yang memegang jabatan fungsional ataupun structural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.

Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Payama simantjuntak yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan kinerja perusahaan atau organisasi termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja dalam organisasi tersebut.¹⁷ Perangkat desa diharapkan memiliki kinerja yang baik sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan. Adapun ukuran yang digunakan untuk mengetahui kinerja perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya maka penulis menggunakan beberapa orientasi pada ukuran kinerja menurut Ratminto dan Winarsih, sebagai berikut:

1. Responsivitas, yang dimaksud dengan responsivitas disini adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap *provider* terhadap harapan keinginan, aspirasi serta tuntutan *customer*

¹⁷ Indra Merev Waani, Kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik, Vol 1, No 3 (2014), <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/4470>, 13 agustus 2016

2. Keterbukaan/transparasi, ukuran keterbukaan atau transparasi adalah bahwa prosedur/tatacara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib di informasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak di minta.
3. Empati ukuran yang menunjukkan perlakuan atau perhatian pemerintah daerah atau penyelenggaraan jasa pelayanan atau provider terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang dimasyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila perangkat desa memiliki kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik maka pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat tercapai sesuai dengan yang di harapkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukana hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu meningkatkan taraf kehidupan.¹⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Selain beberapa indikator kinerja seperti yang di uraikan diatas, juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas kinerja individu atau organisasi.

¹⁸ Djen Ahmad Idrus, peran Kepala Desa Kanjilo Dalam Memperdayakan Masyarakat di Bidang Pembangunan Infrastruktur desa, *Skripsi*, jurusan ilmu pilotik fakultas Ushuluddin, Filsafat dan politik (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015), h. 48

Syamsuddin menemukan 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi kinerja (*performance*) individu, yaitu : keterampilan, pengalaman, dan kesanggupan.¹⁹

c. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku.²⁰ Dengan definisi ini, kekuasaan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, tidak ada arena yang tidak dimainkan oleh konsep kekuasaan, mulai dari kekuasaan politik hingga kekuasaan pada ranah social budaya.²¹

Kekuasaan adalah konsep didalam ilmu politik yang paling banyak dibahas dan di permasalahan. Bahkan ada banyak orang awam menganggap bahwa politik adalah kekuasaan itu sendiri. Dalam ilmu politik terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan (*power*), misalnya, seperti : (1) *influence (pengaruh)*, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela; (2). *force*, penggunaan kekuatan nonfisik guna bertindak sesuai dengan kehendak yang memerintah, seperti : menimbulkan rasa takut ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis (makanan dan minuman) terhadap pihak lain; (3). *Persuasion* (persuasi), yakni kekuasaan yang bersinggungan

¹⁹Syamsir Torang, Metode Riset struktur & perilaku organisasi, Bandung, Alfabeta Anggota (IKAPI), 2012) h.119-120

²⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI, 2008). h.18

²¹Aggriani Alamsyah, *Etika Politik*, Uin Alauddin Makassar 2012.h. 117

dengan kemampuan pemberi perintah dalam menyakinkan dalam menyakinkan orang lain dengan argumentasi logis-rasional untuk melakukan sesuatu; (4). *Manipulation* (manipulasi), penggunaan pengaruh dimana orang yang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya sedang mematuhi keinginan pemegang kekuasaan; (5). *Coercion* atau *coercive*, peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok (biasanya menyertakan tindakan fisik/kekerasan) terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan, termasuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak yang dipengaruhi; (6). *Authority* (kewenangan), atau dalam bahasa Max Weber sebagai otoritas legal-formal, dimana seseorang memiliki kekuasaan oleh karena legalitas yang melekat dalam dirinya.

d. Kepemimpinan

Kepemimpinan secara etimologi adalah kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. Secara termonologi banyak di temukan definisi kepemimpinan yang dikemukakan. Manajemen biasanya mendefinisikan kepemimpinan menurut pandangan pribadi mereka, dan aspek-aspek fenomena dari kepentingan yang paling baik bagi pakar yang bersangkutan. Seperti Kepemimpinan yang

dikemukakan oleh Edwin A. Locke, adalah proses membujuk (*inducing*) orang lain untuk mengambil langkah-langkah menuju suatu sasaran bersama.²²

Menurut Nasution (2004:199) Gaya Kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Gaya kepemimpinan ini pada gilirannya ternyata merupakan dasar dalam membedakan atau mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu :

1. Gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, agar mampu mewujudkan tujuan secara maksimal.
2. Gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan pelaksanaan hubungan kerja sama.
3. Gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan hasil yang dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Disini pemimpin menaruh perhatian yang besar dan memiliki keinginan yang kuat, agar setiap anggota berprestasi sebesar-besarnya.²³

²² Salmah Intan, *Sorotan Terhadap Gender dan Kontroversi Kepemimpinan Perempuan* (Makassar: Alauddin University press, 2013), h. 59-70.

²³ Marselinus Ajang, Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa Di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, volume 3 nomer 4, *ejurnal ilmu pemerintahan*, 2014 [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/sitewp-content/uploads/2015/11/JURNAL%20\(11-18-15-02-51-16\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/sitewp-content/uploads/2015/11/JURNAL%20(11-18-15-02-51-16).pdf), 10 oktober 2016, h. 5

Organisasi sangat membutuhkan peranan seorang pemimpin oleh karena pemimpin memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam mencapai tujuan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi atau pengetahuan (manajerial dan strategi) yang lebih, berperilaku yang baik, mampu mempengaruhi atau mengarahkan orang lain, harus mengambil keputusan, bertanggung jawab, baik dalam penyampaian ide, bijak, mengayomi dan memberi motivasi serta mampu melakukan pendekatan personal (*human relation*) dengan bawahannya.

F. METODE PENELITIAN

Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkandata. Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari obyek penelitian.

Menurut *Lexy J Moleong* mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomenatentang apa yang di ambil oleh subyek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁴

²⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kaulitatif*, (Bandung : Rosda Karya, 2010). H. 10

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini akan di gunakan metode deskriptif atau menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena social dari sudut pandang partisipan.

Metode kualitatif telah di gunakan dalam banyak sub bidang ilmu politik karena para partisipan dalam dunia politik mau berbicara tentang keterlibatan mereka dalam kelompok, peran mereka dalam jabatan kekuasaan formal, pandangan mereka tentang sistem politik, dan sebagainya. Para ilmuan politik, dan sebagai para ilmuan politik misalnya, sering mewawancarai para aktivis kelompok penekan.

Oleh karena itu, ada sejumlah tehnik riset yang tergolong dalam riset kualitatif, yang telah di gunakan secara luas oleh para sosiolog dan ilmuan politik yang telah memilih satu atau lebih di antaranya untuk mengumpulkana pengalaman subjektif seseorang, opini, keyakinan, nilai, dan seterusnya. Meski para peneliti akademis biasanya memilih sebuah tehnik riset yang paling cocok dengan apa yang hendak mereka teliti, namun pilihan metode bukan semata-mata perkara keunggulan teknis²⁵

²⁵David Marsh dan Gerry stoker, *teori dan metode dalam ilmu politik*, Nusa Media 2010,h. 242-243

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan di selidiki.

Terkait dengan metode penelitian ini, maka metode penelitian ini di gunakan untuk member gambaran tentang bagaimana Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Kinerja Politik Kepala desa Di Desa Baraya, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten jeneponto, dengan melihat kondisi jalanan didesa Baraya ini cukup memprihatinkan dimna kondisi jalannya apabila hujan akan banyak genangan air dan banyaknya lubang-lubang besar dan licin di jalanan sedangkan ini merupakan jalan utama bagi masyarakat sekitar.

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang di gunakan untuk menghimpun data penelitian untuk melalui pengamatan dan pendirian secara langsung terhadap objek yang diteliti.²⁶ Observasi lansung juga dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal

²⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kaulitatif*, (Bandung : Rosda Karya, 2010). h. 115

atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal. Observasi yang saya lakukan itu di desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan dwawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitumenggunakan metode wawancara tak berstruktur. Wawancara takberstrukur adalah yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang diginakan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan secara garis besar.²⁷ Paling utama dalam melakukan wawancara adalah memerhatikan kemampuan pewawancara dalam mengendalikan wawancara.²⁸

Untuk memperoleh informasi yanag tepat dan objektif setiap *interviewer* harus mampu menciptakan hubungan baik dengan *interviewee* atau respondenatau mengadakan *raport*, yaitu situasi psikologis yang menunjukkan bahwa responden bersedia bekerja sama, bersedia menjawab pertanyaan dan memberi informasi sesuai dengan pikiran serta memberi informasi

²⁷ Sugioto, *Metodepenelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. (Bandung :Alfabet. 2008), h. 223-234

²⁸H. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta : Kencana Prenada Media grup, 2007), h. 115

sesuaidengan keadaan yang sebenarnya.²⁹ Target wawancara saya yaitu kepala Desa Baraya, masyarakat Desa Baraya, serta Tokoh Pemuda Desa Baraya

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa.

Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian.

Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang bagaimana Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Kinerja Politik Kepala Desa Baraya, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis digunakan penulis untuk proses penyusunan dalam mengkategorikan data, mencari pola dengan maksud memahami maksudnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Analisis deskriptif itu sendiri yaitu analisis yang tidak berdasarkan

²⁹Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009). h. 179

perhitungan angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang digunakan secara deskriptif.

Untuk menganalisis berbagai fenomena dilapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi datakasar yang muncul dari catatan lapngan. Langkah ini bertujuan untuk mmemilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Penyajian data setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*Display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menajdiinformasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.
- c. Penarikan kesimpulan (*Verifikasi*)

Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan, sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola - pola, penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi.³⁰ Dalam penelitian ini

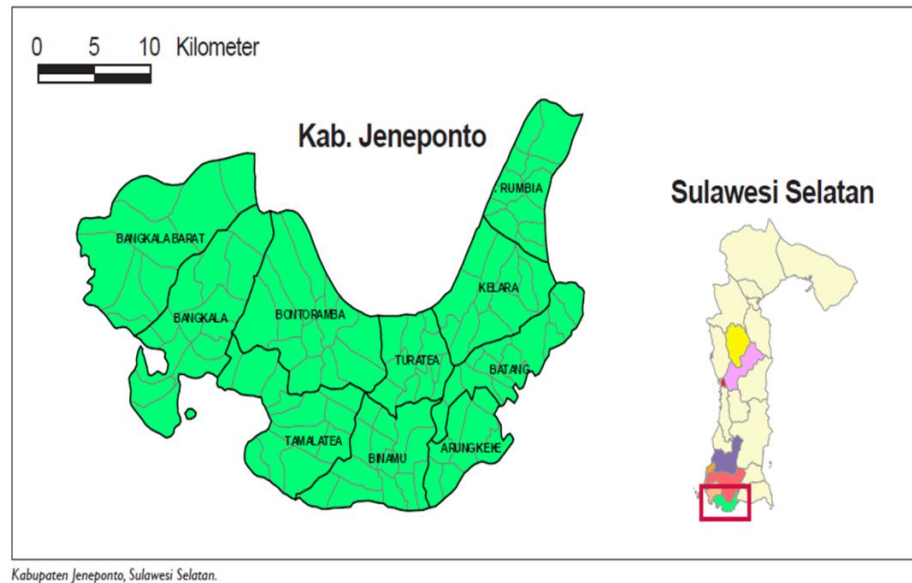
³⁰ Matthew B Miles Dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992), h. 10-17.

penarikan kesimpulan dilakukan berangkat dari kinerja Birokrasi desa sehingga kurangnya pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Baraya. Untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan hubungan keterkaitan antara keduanya. Apabila ketiga tahapan tersebut telah selesai dilakukan, maka kemudian diverifikasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto



Luas wilayah kabupaten jeneponto adalah sekitar 749,79 km². Daerah ini terdiri atas 11 kecamatan dengan 82 desa dan 31 kelurahan. Secara geografis daerah ini terdiri dari 25% (28 desa/kelurahan) merupakan daerah pesisir, 8% (9 desa/kelurahan) lembah, 27% (30 desa/kelurahan) lereng/bukit, dan 40,17% (40 desa) adalah dataran.

Kabupaten Jeneponto terletak di bagian selatan provinsi sulawesi selatan dengan posisi antara 50⁰.23'12"-5⁰.42'1,2" Lintang Selatan dan 119⁰.29'12"-119⁰.56'44,9" bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan kota Takalar sebelah selatan berbatasan dengan laut flores, sebelah barat berbatasan

dengan kabupaten Takalar dan sebelah timur berbatasan dengan kabaupaten Bantaeng.

Kabupaten Jeneponto terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi antara $50^{\circ}23'12''$ - $5^{\circ}42'1,2''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}29'12''$ - $119^{\circ}56'44,9''$ bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan kota Takalar sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

B. Gambaran Umum Desa Baraya

Desa Baraya Berada di kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Desa Baraya sendiri memiliki Luas wilayah desa Baraya adalah sekitar 10,13 km^2 . Daerah ini terdiri atas 7 dusun yaitu Dusun Baraya 1, dusun Baraya 2, Dusun Baraya 3, Dusun Gantinga, Dusun Bangkeng Nunu, Dusun Paranglenyu, Dusun Bontoba'do. Sebelah utara berbatasan dengan Barobbo, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bontoramba, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanammawang. Jarak desa Baraya ke Kecamatan yaitu 5,7 km, dan jarak menuju ke Kabupaten yaitu 15,0 km.

C. Kependudukan

Penduduk Desa Baraya mayoritas beragama Islam dengan Jumlah Penduduk 3.040 jiwa. Dengan spesifikasi jenis kelamin yaitu laki-laki berjumlah 1.442 jiwa, sedangkan perempuan 1.599 jiwa.

Lebih banyaknya jumlah penduduk perempuan dibandingkan laki-laki ini diduga salah satu penyebabnya karena penduduk laki-laki banyak yang bekerja untuk mencari nafkah dan menetap diluar daerah, seperti Kota Makassar dan sekitarnya, namun tidak mengesampingkan bahwa jumlah kelahiran lebih dominan jenis kelamin perempuan.

Pertumbuhan penduduk di daerah ini masih relatif kecil, namun demikian perlu selalu dimonitor agar tetap terkendali karena oleh banyak pihak pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan suatu hal yang merisaukan apalagi bila tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Dengan kata lain apabila pertumbuhan penduduk lebih besar dibanding dengan pertumbuhan ekonomi maka dipandang bahwa pertumbuhan penduduk akan menjadi masalah. Pertumbuhan penduduk yang positif pada akhirnya akan memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri.

Peningkatan kepadatan penduduk tentunya akan menyulitkan pemerintah dalam penyediaan berbagai macam fasilitas. Jika hal tersebut diikuti dengan peningkatan potensi penduduk, terutama dari segi ekonomi, maka peningkatan kepadatan penduduk sedikit akan mengurangi masalah yang dirisaukan.

D. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang diperoleh pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga. Perubahan yang diukur adalah perubahan produksi sehingga menggambarkan pertumbuhan riil ekonomi.

Keadaan perekonomian di Desa Baraya masih bersifat agraris, yakni segala kehidupan perekonomian masyarakat masih menggantungkan diri kepada alam. Dimana sekitar 90% masyarakatnya masih berprofesi pada bidang agraris yakni sebagai petani dan pekebun. Penghasilan pokok masyarakat Desa Baraya adalah beras dan jagung.

Persawahan di Desa Baraya ini masih ada yang menggunakan *Annyalaga* atau *annangkala* (bajak) yaitu dengan menggunakan 1 ekor kuda didepan dan ad juga yang sudah memakai mesin traktor. Kegiatan perekonomian lainnya yaitu tidak sedikit dari masyarakat desa Baraya yang mengadu nasib ke kota-kota besar misalnya Makassar, banyak dari masyarakat desa Baraya yang bekerja di Makassar sebagai supir *pete-pete* (angkutan Umum), penarik Bentor, dan bekerja ditempat lainnya seperti mall dan lain-lain, tak jarang pula ada masyarakat yang sampai rela keluar kota sulawesi hanya untuk meningkatkan ekonomi mereka.

Berikut ini adalah pendapatan Masyarakat yang ada di desa Baraya, antara Lain:

Tabel I.I Sumber pendapatan Desa Baraya

Jenis pekerjaan	PNS/ ABRI	PENSIUNAN/ VETERAN	PETANI	PEDA- GANG	INDU- STRI	ANG- KUTAN	JASA
	18	8	1020	36	42	171	36

Sumber : Kecamatan Bontoramba Dalam Angka 2016

E. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ada di desa Baraya sangat kurang, tetapi dari tahun ketahun sudah memiliki perubahan itu terbukti dengan mulainya banyak anak generasi muda desa Baraya untuk melanjutkan pendidikannya sampai keluar daerah bahkan keluar kota. Pada tahun-tahun sebelumnya masyarakat desa baraya hanya fokus kerja tidak terlalu mementingkan pendidikan mereka. Di desa Baraya sendiri hanya memiliki 2 sekolah dasar negeri yaitu SDN 99 Tinggimaeng yang ada di Dusun Baraya 1 dan SDN Gantinga yang berada di dusun Gantinga sedangkan jumlah guru yang ada di sekolah tersebut masing-masing hanya memiliki masing-masing 7 guru dari setiap sekolah.³¹

³¹Sumber data *Kecamatan Bontoramba Dalam Angka 2016*, 17 oktober 2016

F. Agama

Mayoritas penduduk desa Baraya adalah pemeluk agama islam. Menurut data kependudukan, jumlah penduduk yang beragama islam yakni sebesar 100%. Dikarenakan masyarakat desa Baraya memeluk agama islam maka jumlah sarana peribadahan yang ada di desa Baraya berjumlah 5 buah Masjid/Mushollah.

G. Kesehatan

Secara umum kondisi kesehatan di desa Baraya belum cukup aksimal, hal ini dikarenakan kurangnya tersedia sarana dan prasarana kesehatan. Khususnya di desa Baraya hanya ada beberapa sarana dan prasarana yang ada di desa Baraya yaitu :

1. Pustu : 2 buah
2. Bidan Desa : 1 orang

Itupun fasilitas di atas tidak berfungsi sesuai dengan fungsinyajadi banyak dari masyarakat desa Baraya yang apabila sakit atau akan melahirkan harus keluar desa untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut.

H. Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya dalam tataran masyarakat Desa Baraya merupakan suatu tataran masyarakat yang berpegang teguh pada kepercayaan agama Islam. Hubungan kekerabatan dan ikatan kekeluargaan dalam lingkup

desa Baraya sangat erat dimana masyarakat memiliki unsur gotong royong yang sangat erat.

I. Musim

Keadaan musim di Desa Baraya pada umumnya sama dengan keadaan musim di daerah lainnya dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dikenal dengan 2 (dua) musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi antara bulan november samapai dengan bualan april, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan mei sampai dengan bulan oktober.³²

³²Sumber data *Kecamatan Bontoramba Dalam Angka* 2016, 17 oktober 2016

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Kinerja Politik Pemerintahan Desa Terhadap Perbaikan Jalan Desa di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

Kinerja kepala desa dapat di artikan sebagai pemberian pelayanan terhadap keperluan orang (masyarakat) atau kualitas para kinerja birokrat yang sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. Salah satu objek yang menajdi pembahasan pada penelitian iniyakni kinerja pemeritahan desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

Dewasa ini definisi mengenai politik yang sangat normatif itu telah mendesak oleh definisi-definissi lain yang lebih menenkankan pada upaya (*means*) untuk mencapai masyarakat yang baik lebih seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan alokasi nilai, dan sebagainya.

Namun demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya atauyang disebut Peter Merkl: “Politik dalam suatu bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*politics, at its best is a noble queas for a good order and justice*)- betapa samar-samar pun tetap hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan politik. Dalam pada itu

tentuperlu disadari bahwa persepri mengenai baik dan adil dipengaruhi oleh nilai serta ideologi masing-masing dan zama yang bersangkutan.³³

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Begitu pentingnya kekuasaan dalam studi politik, maka bidang ini di ibaratkan bahwa politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral-moral yang di anut bersama.

Seperti kepemimpinan kepala desa hal yang mutlak diperlukan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan mempunyai hubungan emosional yang tinggi. Kepemimpinan kepala desa merupakan hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama demi kepentingan masyarakat luas.

Menurut kepala Desa Baraya pembangunan infrastruktur jalan desa sudah ada kemajuan, tetapi hal ini tidak sesuai yang dikatakan masyarakat Desa Baraya.

Seperti yang di kemukakan oleh Kepala Desa Baraya : "*Pembangunan Infrastruktur didesa Baraya sudah ada perubahan*"³⁴

³³Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*(PT Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI, Jakarta, 2008), h. 14-15

³⁴Basuki Nompo, Kepala desa Baraya, 48 tahun, *wawancara*, 27 september 2016, pukul 16.14 wita

Apa yang dikatakan kepala desa tidak sesuai dengan fakta di desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Menurut tokoh pemuda yang tinggal di desa Baaraya :

“Tentang perbaikan jalan desa saya rasa kurang perhatian dari pemerintah buktinya saja sampai saat ini belum ada yang bisa kita lihat.”³⁵

Seperti halnya yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat desa Baraya mengatakan :

“Kinerja desa Baraya saat ini masih perlu ditingkatkan mengingat masih banyak pembangunan infrastruktur yang belum dijalankan disebagian dusun, mengingat kepala desa saat ini sudah menjabat selama kurang lebih 3 tahun, jadi pembangunan infrastruktur masih perlu sangat di tingkatkan”³⁶

Sama halnya yang dikatakan oleh tokoh pemuda desa Baraya dan sekaligus ketua Karang Taruna Desa Baraya yaitu :

“Kalau dilihat dari pembangunannya belum ada yang nampak yang dilihat oleh mata kepala, anggaran sudah banyak tapi kenyataannya belum nampak, mungkin tahun yang akan datang bisa nampak atau tahun 2017 mungkin nampak tapi tahun ini belum nampak yang kita lihat dan mengenai jalan tani masih perlu diperbaiki”.³⁷

Dalam pengertian yang disebutkan bahwa kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pikiran dan tingkah laku orang atau sekelompok orang lain, sehingga orang yang

³⁵Nur Rahma, tokoh perempuan, 22 tahun, wawancara, 6 oktober 2016, pukul 20.00 Wita

³⁶Lallo, masyarakat desa, 41 tahun, wawancara 28 september 2016 pukul 15.00 Wita

³⁷Dg Bonto, ketua Karang Taruna Desa Baraya, 31 tahun, wawancara, 25 september 2016, pukul 15.33

dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan melakukannya.³⁸

Pengaruh biasanya tidak merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang dan sering bersaing dengan faktor lain. Bagi pelaku yang dipengaruhi masih terbuka alternatif lain untuk bertindak. Akan tetapi, sekalipun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan dengan kekuasaan, kadang-kadang mengandung unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu sering kali cukup berhasil.³⁹

Pelayanan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa masih kurang baik. Di karenakan bukti-bukti tentang pembangunan infrastruktur desa masih memerlukan perhatian khusus. Ini membuktikan bahwa masih kurangnya kinerja birokrasi dari segi perbaikan atau pembangunan infrastruktur.

Menurut yang dikatakan oleh salah satu Masyarakat desa Baraya :

*“Yang jadi masalah saat ini adalah tentang pembangunan infrastruktur karena sudah berapa tahun ini belum ada perbaikan infrastruktur sama sekali”*⁴⁰

Menurut keterangan di atas adalah kinerja birokrasi desa masih perlu ditingkatkan lagi mengingat banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang kinerja birokrasi desa.

³⁸Anggriani Alamsyah, *Etika Politik* (Makassar :UIN Alauddin Press, 2012), h. 117

³⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*(PT Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI, Jakarta, 2008), h. 67

⁴⁰Judding, Pedagang, 36 tahun, *wawancara*, 26 september 2016 pukul 15.47 wita

Menurut peneliti kantor desa pula harus digunakan sebagai mana mestinya. kalau dapat di lihat, selama ini kantor desa tidak digunakan sebagai mana mestinya, kantor desa hanya di gunakan kalau ada rapat-rapat dan sebagainya. Ketika proses kegiatan pelayanan kepada masyarakat berlangsung, staf yang berwenang untuk mengurus keperluan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut tidak ada di tempat pelayanan pada saat jam kantor. Ini di karenakan ada saat dimana selain harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, staf di desa juga harus bisa membagi waktu untuk melakukan kepentingan pribadi salah satunya seperti mengurus lahan pertanian. karena mayoritas dari mata pencarian masyarakat di desa Baraya ini adalah dengan bertani

Peran kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja aparatur Desa di Desa Baraya masih sangat perlu ditingkatkan meski perkembangan desa dari segi nonfisik sudah cukup berkembang tapi dari segi non fisik atau pembangunan infrastruktur desa masih sangat kurang.

Walaupun peran kepemimpinan begitu besar dalam menggerakkan bawahannya namun kepemimpinan tidak lepas dari hambatan – hambatan atau masalah yang ada seperti misalnya minimnya inovasi pemimpin, kurangnya tanggung jawab dan supervise serta keteladanan yang kurang. sehingga menyebabkan kinerja pegawai ikut menjadi terpengaruh menjadi kurang baik atau optimal terutama dalam hal kuantitas pekerjaan yang dihasilkan, kualitas

pekerjaan yang kurang baik serta ketepatan waktu pekerjaan yang tidak ada kejelasan.

Sebenarnya dalam setiap anggaran dana desa dan pembangunan infrastruktur sebuah desa dapat terwujud dengan baik, asalkan ada kerja sama, rasa saling membantu dan percaya pemerintah setempat dan masyarakat desa. Hal ini sangatlah penting untuk memajukan sebuah desa yang berkembang. Jika salah satu atau ada di antara golongan mereka saling bertolak belakang maka desa tersebut tidak akan berkembang cepat atau bahkan tidak akan berkembang maju.

Untuk menumbuh kembangkan desa mandiri, sangat perlu diperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Ditumbuhkan tekhnik kepemimpinan yang terbuka dalam arti pemerintahan desa (kepala desa) secara terbuka memusyawarahkan rencana dan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga formal yang ada di desa.
- b. Pemerintah desa, khususnya kepala desa agar memahami benar kedudukannya yang bersifat dualistis artinya sebagai pemimpin desa karena dia dipilih oleh rakyat desa untuk itu kepala Desa harus bertanggung jawab tentang perkembangan desanya. Disamping itu sekaligus sebagai wakil pemerintah ditingkat atasnya yang menyelenggarakan kepentingan pemerintah pula.

- c. Dalam rangka pengembangan otonomi desa, maka pemerintah Desa agar lebih mampu menciptakan kreatifitas untuk menumbuhkan dan mengembangkan desa ke arah kemajuan.
- d. Mengelola sumber data alam dan sumber daya manusia melalui kemampuan manajemen usaha yang memadai, agar dapat menciptakan dan membentuk kekayaan desa untuk menciptakan penghasilan desa yang jelas dan teratur sehingga desa mampu membiayai kegiatan rutin dan pembangunan.

Melalui upaya-upaya demikian diimbangi dengan pelaksanaan kegiatan secara terpadu, maka secara bertahap desa mandiri akan dapat terwujudkan.⁴¹

Pembangunan partisipasi merupakan upaya untuk memperdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di bidang infrastruktur desa yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrembang Desa).⁴²

Seperti yang dikemukakan oleh narasumber tokoh pemuda desa Baraya yaitu:

“Mungkin karena kurangnya perhatian dari pemerintah desa sehingga infrastruktur sampai saat ini belum ada perbaikan”⁴³

⁴¹ Drs. I Nyoman Beratha, *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, (Bumi aksara Jakarta, Anggota IKAPI, Jakarta 1991), hal 132-133

⁴² Djen Ahmad Idrus, peran Kepala Desa Kanjilo Dalam Memperdayakan Masyarakat di Bidang Pembangunan Infrastruktur desa, *Skripsi*, jurusan ilmu politik fakultas Ushuluddin, Filsafat dan politik (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015), h. 53

⁴³Nur Rahma, tokoh perempuan, 22 tahun, wawancara, 6 oktober 2016 pukul 21.01 wita

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang-undang RI No 6 Tahun 2014 pasal 23 pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Kemudian pasal 25 pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh perangkat desaa atau yang disebut dengan nama lain. Kemudian pasal 1 disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴⁴

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang di ambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.⁴⁵

Melihat kondisi saat ini kepemimpinan kepala desa Baraya masih belum maksimal, kondisi ini diketahui dari indikator, seperti pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalanandan sebagainya masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, dengan kata lain usaha-usaha yang dilakukan kepala desa yang merupakan bentuk kepemimpinannya belum sepenuhnya di laksanakan dengan baik.

⁴⁴ Djen Ahmad Idrus, peran Kepala Desa Kanjilo Dalam Memperdayakan Masyarakat di Bidang Pembangunan Infrastruktur desa, *Skripsi*, jurusan ilmu pilotik fakultas Ushuluddin, Filsafat dan politik (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015), h, 42-43

⁴⁵MiriamBudiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI, 2008)h. 20

Oleh karena itu faktor kemampuan Kepala Desa selaku aparat pelaksana dan merupakan pimpinan formal di Desa dan Mempunyai peranan yang sangat sentral yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desanya. Karena dari kemampuan kepala desa yang bersangkutan didalam mempengaruhi dan mengarahakan masyarakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan kepala desa sangatlah menentukan bahkan menjadi kunci utama dapat tidaknya proses pembangunan itu berjalan secara baik dan lancar.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Perbaikan Jalan Desa di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto

a) Faktor Penghambat

1. Kurangnya Perhatian Dari Birokrat Desa

Mencermati perilaku aparat di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dalam memperbaiki pembangunan infrastruktur desa banyak faktor penghambat yang dihadapinya.

Dalam sejarah pembangunan desa telah di tetapkan beberapa peraturan tentang desa, yaitu undang-undang tentang desa, yaitu Undang-undang No 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Undang-undang No 19 Tahun 1965 tentang desa praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III diseluruh wilaya Indonesia, Undang-undang No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Undang-undang No 22 Tahun 1999

tentang pemerintah daerah,⁴⁶ dan yang terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁷

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat mawadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga desa saat ini berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Namun untuk melaksanakan pengaturan serta mendukung terbangnya desa yang berbasis kekinian untuk pemerintah mensahkan undang-undang NO 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sistem pemerintah desa memang perlu ditingkatkan dari segi kinerja para birokrat desa serta harus adanya keterbukaan yang dilakukan oleh

⁴⁶Djen Ahmad Idrus, peran Kepala Desa Kanjilo Dalam Memperdayakan Masyarakat di Bidang Pembangunan Infrastruktur desa, *Skripsi*, jurusan ilmu pilotik fakultas Ushuluddin, Filsafat dan politik (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015), h. 42

⁴⁷Muhammad Isranyah, kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan pembangunan di desa kota bangun seberang kabupaten kutai kartanegara, volume 2, nomer 1, *ejournal ilmu pemerintahan*, 2014 [http://journal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/03/eJournal%20Muhammad%20Isranyah%20Jurnal%20\(03-07-14-04-34-16\).pdf](http://journal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/03/eJournal%20Muhammad%20Isranyah%20Jurnal%20(03-07-14-04-34-16).pdf)
10 oktober 2016

pemerintah desa mengenai kinerja apa saja yang dilakukan oleh para pemerintah desa kepada masyarakat.

Seperti yang dikemukakan narasumber oleh salah satu masyarakat desa

Baraya mengatakan :

“Punna nia lanu jama ri desa nu, atau nia pembangunan lanu suro jama ri desanu rapat ki rodo, supaya kami anggota BPD (badan pengawas desa) tau persis punna lakiminjo nanu jama tapi ka tanre na lebba na a'laporo', tena na lebba rapa' bahkan yangngaseng hasil jamanna tena le'ba na laporkan ri BPD sebagai pertanggung jawaban tena le'ba', ka manna ku kuai apparekko laporan BPDya tena nia'. Na jama ji iyya tpi tena laporanna atau punna nia lanu jama musyawarakann ki rodo' kedesa.”

Artinya :Kalau mau mengerjakan sesuatu, atau kalau ada pembangunan yang mau di suruh kerjakan di desamu adakan dulu rapat. Supaya kami anggota BPD tahu persis kalau kayak begitu yang mau dia kerja tapi tidak pernah ada laporan, tidak pernah mengadakan rapat, bahkan semua hasil kerjanya tidak pernah dia laporkan ke BPD sebagai pertanggung jawaban tidak pernah, biar saya ajari suruh membuat laporan ke BPD tidak pernah dia kerja. Dia mengerjakan pemabngunannya tapi tidakdengan laporannya atau kalau ada yang mau di kerja musyawarakann dulu kepada desa (masyarakat desa).⁴⁸

Seperti yang di nyatakan oleh *Blau* dan *Page*, bahwa birokrasi dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang benar. Hal itu hanya dapat berlaku pada organisasi besar seperti organisasi pemerintahan karena pada organisasi pemerintahan segala sesuatunya di atur secara formal, sedangkan pada organisasi kecil hanya di perlukan hubungan informal.⁴⁹

⁴⁸Manninriang, Anggota DPD, 74 tahun, wawancara, 27 september 2016, pukul 16.06 wita

⁴⁹A. Rahman, *system Politik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, h. 172

Kepala Desa sebagai suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan pembangunan dalam wilayah desa sangat berpengaruh karena kepala desa selaku aparat pelaksana sekaligus pimpinan formal dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di desanya harus diketahui dan mendapatkan persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu karena hal ini mencakup wilayah kekuasaannya dan tanggung jawab yang di pikulnya. Begitupun sebaliknya kepala desa harus memusyawarahkan apa-apa kegiatan atau pembangunan yang akan dikerja kepada masyarakat dalam bentuk Musrembang tingkat desa, agar masyarakat tahu pembangunan apa saja yang akan dibangun serta rincian-rincian dananya.

Kepemimpinan secara etimologi adalah kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. Secara termonologi banyak di temukan definisi kepemimpinan yang dikemukakan. Manajemen biasanya mendefinisikan kepemimpinan menurut pandangan pribadi mereka, dan aspek-aspek fenomena dari kepentingan yang paling baik bagi pakar yang bersangkutan. Seperti Kepemimpinan yang dikemukakan oleh

Edwin A. Locke, adalah proses membujuk (*inducing*) orang lain untuk mengambil langkah-langkah menuju suatu sasaran bersama.⁵⁰

Pembangunan infrastruktur di desa Baraya, sangat perlu diperhatikan dengan baik oleh para Birokrasi Desa, mengingat pembangunan di desa Baraya ini masih sangat kurang di bandingkan dengan desa-desa lain, contohnya saja desa Bulusibatang yang pembangunan sudah sangat berkembanag, karena pemerintah desanya sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, serta aktifnya masyaraakat desa dalam membantu setiap kegiatan atau pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desanya.

Seperti yang di katakan olah saudari Rahma selaku anggota pemuda desa Baraya :

“Kendalanya mungkin saja kurangnya komunikasi antara peerintah desa dengan pemerintah daerah sehingga penyaluran infrastruktur berupa perbaikan jalan masih terhambat, terus ketidakpiawaian pemerintah desa dalam mengkoordinir desa yang dipimpinnya sehingga tertinggal dari desa laiannya.”⁵¹

Saat ini desa baraya masih dalam keadaan salah satu desa tertinggal yang ada di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, kurangnya infrastruktur pembangunan fisik mungkin menjadi salah satu penyebab desa Baraya ini menjadi desa tertinggal.

⁵⁰ Salmah Intan, *Sorotan Terhadap Gender dan Kontroversi Kepemimpinan Perempuan* (Makassar: Alauddin University press, 2013), h. 59-70.

⁵¹Nur Rahma, tokoh perempuan, 22 tahun, wawancara, 9 oktober 2016, pukul 12.00 wita

Sebagai aparat pelaksana tugas, selayaknya seorang Kepala Desa dapat melakukan perencanaan, pergerakan, dan pengawasan terhadap organisasi maupun kegiatan masyarakat. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau walikota. Salah satu faktor yang turut serta menentukan keberhasilan dalam mengerjakan Pembangunan Desa adalah kepemimpinan seorang Kepala Desa. Kepala Desa diharapkan dapat memberikan inisiatif, inofasi, motifasi dan tanggung jawab yang baik dalam menggerakkan pembangunan desa agar dapat meningkatkan keberhasilan program pemerintah maupun dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

2. Kepemimpinan Yang Lemah

Kepala Desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.

Begitupun yang dikekukakan oleh salah satu tokoh masyarakat desa Baraya yaitu:

“Mungkin saja faktor kesehatan yang menjadi penghambat dari semua pembangunan infrastruktur mengingat selama beliau menjabat sebagai kepala desa di desa Baraya ini kesehatan beliau sering terganggu, jadi hampir sebagian semua pembangunan infrastruktur tersebut terhambat.”⁵²

Karena sebagaimana yang di ketahui bahwa selama kepala desa Baraya menjabat sebagai Kepala Desa Baraya, kesehatan yang dialaminya selalu menurun. Bahkan tidak jarang dia absen dalam mengikuti pembukaan atau memberi sambutan-sambutan bila ada kegiatan yang di laksanakan di desa Baraya.

Dengan berbagai kenyataan seperti di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban seorang Kepala Desa amatlah berat. Mengingat tugasnya yang berat tersebut maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terutama dalam hal menjalankan serta meningkatkan pembangunan bagi masyarakatnya ia perlu dibantu oleh perangkat desa yang lain di samping perlu baginya untuk mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan aparat pemerintah yang ada di atasnya maupun dengan aparat lain yang terkait.

Sebagai aparat ia juga dituntut untuk mampu merespon berbagai perubahan dan raga kebutuhan publik. Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.

⁵²Lallo, masyarakat desa Baraya, 41 tahun, *Wawancara*, 28 september 2016, pukul 15.00
Wita

Dengan kedudukan tersebut, Kepala Desa dapat dikatakan memiliki posisi yang sangat strategis dalam organisasi pemerintahan Desa. Keberhasilan dalam menggerakkan pembangunan desa sangat tergantung pada kepemimpinan kepala Desa itu sendiri.

Selain itu nama pemerintah setempat pasti akan baik jika apa yang telah direncanakan bisa terealisasi dengan baik dan jujur. Sehingga kepercayaan atas pemerintah setempat dapat kembali dikalangan masyarakat desa Baraya

Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban memimpin, membina, membimbing, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan dan penyusunan perencanaan pemberian pelayanan umum pemerintahan Desa meliputi kegiatan kesekretariatan, penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan berdasarkan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Menurut peneliti pembangunan infrastruktur desa terutama jalan desa masih sangat butuh perhatian lebih, mengingat banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap perbaikan infrastruktur jalan ini mengingat jalan ini adalah jalan utama warga desa untuk keluar masuk desa.

3. Tidak Tersedianya Lahan Untuk membuat jalan

Menurut pemerintahan desa tidak tersedianya lahan atau masyarakat yang enggan untuk memberikan sedikit lahan tanah mereka untuk digunakan sebagai jalan desa.

Seperti yang di ungkapkan kepala desa Baraya :

“Utamanya dibidang infrastruktur jalan tani biasanya yang punya lahan persawahan tidak mau memberikan sedikit tanahnya, meski kita kasih imbalan yang sesuai”⁵³

Masyarakat enggan memberikan jalan karena menurut mereka mungkin karena tidak adanya ganti rugi yang akan di sediakan oleh pemerintah desa, mereka juga tidak mau memberikan tanah mereka karena tanah atau lahan tersebut adalah tumpuan hidup mereka atau mata pencahariana mereka satu-satunya jadi mereka enggan untuk memberikan tanah/lahan mereka meski hanya sedikit.

Faktor kemampuan Kepala Desa selaku aparat pelaksana dan merupakan pimpinan formal di Desa dan Mempunyai peranan yang sangat sentral yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desanya. Karena dari kemampuan kepala desa yang bersangkutan didalam mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan kepala

⁵³ Basuki Nampo, Kepala Desa Baraya, 48 tahun, wawancara, 27 september 2016, pukul 16.14 wita

desa sangatlah menentukan bahkan menjadi kunci utama dapat tidaknya proses pembangunan itu berjalan secara baik dan lancar.

b) Faktor Pendukung

Sebagai pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai pengatur masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang Kepala Desa mengetahui kondisi atau keadaan penduduknya yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya maka dapat diambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab jika pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Partisipasi penduduk merupakan hal yang urgen tak kalah penting dalam sebuah pembangunan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam pembangunan. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi merupakan salah satu komponen untuk mencapai pembangunan yang intensif, sebab tanpa dukungan dan partisipasi penduduk maka pembangunan tidak akan berhasil.

Oleh sebab itu untuk kelancaran pembangunan maka masyarakat harus berpartisipasi dimana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di

kantor Desa maupun kecamatan, memberi ide pemikiran atau gagasan tertentu, menyumbang bantuan baik berupa tenaga.

Karena sebagai mana yang diketahui bahwanya masyarakat Desa Baraya sangat antusias apabila ada pelaksanaan/pembangunan yang akan dilaksanakan.

Seperti yang dikemukakan oleh saudari Rahmawati bahwasanya :

*“Masyarakat Desa sangat antusias dalam membantu melaksanakan pembangunan, apabila ada pembangunan di Desa Baraya, biasanya masyarakat akan bergotong royong saling membantu dalam membangun infrastruktur”.*⁵⁴

Adapun faktor pendukung lainnya yaitu dari sektor pertanian, dimana yang penulis ketahui bahwa di Desa Baraya ini hampir 90% itu adalah seorang petani jadi apabila pemerintah desa dapat memanfaatkan dengan baik dalam sektor pertanian bisa saja masyarakat Desa Baraya akan mengalami perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Perangkat desa diharapkan memiliki kinerja yang baik sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan. Adapun ukuran yang di gunakan untuk mengetahui kinerja perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya maka penulis menggunakan beberapa orientasi pada ukuran kinerja menurut Ratminto dan Winarsih, sebagai berikut

1. Responsivitas, yang dimaksud dengan responsivitas disini adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan masyarakat

⁵⁴Nur Rahma, tokoh perempuan, 22 tahun, wawancara, 6 oktober 2016, pukul 20.00 Wita

menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap *provider* terhadap harapan keinginan, aspirasi serta tuntutan *customer*

2. Keterbukaan/transparansi, ukuran keterbukaan atau transparansi adalah bahwa prosedur/tatacara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
3. Empati ukuran yang menunjukkan perlakuan atau perhatian pemerintah daerah atau penyelenggaraan jasa pelayanan atau provider terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang dimasyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila perangkat desa memiliki kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik maka pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek

tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu meningkatkan taraf kehidupan.⁵⁵

⁵⁵ Djen Ahmad Idrus, peran Kepala Desa Kanjilo Dalam Memperdayakan Masyarakat di Bidang Pembangunan Infrastruktur desa, *Skripsi*, jurusan ilmu politik fakultas Ushuluddin, Filsafat dan politik (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015), h. 48

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses pembangunan Desa dikatakan bahwa pembangunan meliputi aspek fisik dan non fisik. Yaitu dimaksud dengan pembangunan fisik adalah pembangunan yang berupa perwujudan dan dapat dilihat dengan nyata. Jadi pembangunan yang berwujud yaitu, Pembangunan sarana jalan, pembangunan tempat peribadahan, pembangunan sarana pendidikan, pembangunan gedung serba guna, dll. Sedangkan untuk nonfisik yaitu Kegiatan keagamaan, Kegiatan pendidikan dan kesejahteraan keluarga, Kegiatan keluarga berencana dan lain-lain, Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala desa Baraya selama ini masih belum maksimal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, itu terbukti karena masih banyaknya masyarakat desa Baraya yang mengeluh atas kinerja kepala desa selama ini, mengingat kepala desa sekarang sudah menjabat selama kurang lebih 3 tahun. Seorang pemimpin harus mengawali dengan membangun kesadaran dirinya bahwa kepadanya ada penanggung jawaban kepemimpinan.
2. Faktor penghambat kurangnya pembangunan desa Baraya ini yaitu kurangnya perhatian dari birokrasi desa sehingga pembangunan yang ada di desa baraya masih belum maksimal serta kesehatan yang di alami oleh

kepala desa Baraya jugalah yang menghambat kinerja pemerintah karena selama dia menjabat sebagai kepala desa kesehatan beliau sering terganggu jadi beliau kurang mampu untuk memenej desa yang dipimpinnya dan kurang mampu untuk mengontrol masyarakat dan desa yang di pimpinya tersebut, dan faktor lain yang menyebabkan kurangnya pembangunan infrastruktur yaitu kurangnya masyarakat yang enggan memberikan lahan/tanahnya kepada pemerintah untuk dijadikan jalan desa. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu antusiasnya masyarakat Desa Baraya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jadi pemerintah desa dapat menggunakan tenaga masyarakat Desa Baraya dalam melakukan pembangunan untuk meminimaliskan anggaran desa yang ada.

B. Implikasi Penelitian

Pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Desa Baraya ini cukup memprihatinkan dibandingkan dengan desa Bulusibatang yang sudah mulai memiliki peningkatan dari tahun ke tahun. Ketika infrastruktur jalan yang ada di Desa Baraya bila musim hujan datang, maka banyak jalan yang tergenang air, banyak pula jalan yang memiliki lubang yang cukup besar dan licin, sedangkan ini merupakan jalan utama bagi masyarakat Desa Baraya.

Hal adalah, sekolah, di Desa Bulusibatang ini sudah memiliki 2 SMP/ sederajat dan 2 SMA/ sederajat dibandingkan desa Baraya yang hanya memiliki 2 Sekolah Dasar, dengan sarana yang tidak terlalu memadai.

Selain sekolah, Desa Bulusibatang juga sudah memiliki pasar dan Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas). Karenanya penulis menyarankan agar para perangkat desa dan atas dukungan dari masyarakat juga membangun fasilitas yang serupa, agar desa menjadi lebih baik kedepannya.

Selain itu, ketika proses kegiatan pelayanan kepada masyarakat berlangsung, staf yang berwenang untuk mengurus keperluan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut tidak ada di tempat pelayanan pada saat jam kantor. Ini dikarenakan ada saat dimana selain harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, staf di desa juga harus bisa membagi waktu untuk melakukan kepentingan pribadi salah satunya seperti mengurus lahan pertanian. Karena mayoritas dari mata pencarian masyarakat di desa Baraya ini adalah dengan bertani.

Dan juga di Desa Baraya masih sangat dibutuhkan fasilitas komputer, seperti sekarang di kantor hanya ada satu unit komputer yang ditempatkan di dalam ruang Kepala Desa dan ini berdampak kurang efisiennya pelayanan administrasi. Terkadang kalau diperlukan untuk mencetak administrasi persuratan, aparat harus mencetak (print) di luar, sebaiknya di kantor ini ditambahkan lagi 2 unit komputer. Begitu pun di kantor juga dibutuhkan lemari untuk penyimpanan berkas administrasi, lemari berkas di kantor ini belum ada.

Sistem pemerintahan desa memang perlu ditingkatkan dari segi kinerja para birokrat desa serta harus adanya keterbukaan yang dilakukan oleh

pemerintah desa mengenai kinerja apa saja yang dilakukan oleh para pemerintah desa kepada masyarakat

Peran kepala desa juga selaku aparatur desa ini dalam meningkatkan kinerja birokrat Desa di Desa Baraya masih sangat perlu ditingkatkan meski perkembangan Desa dari segi nonfisik sudah cukup berkembang tapi dari segi nonfisik atau pembangunan infrastruktur Desa masih sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an & Terjemahannya, 2014 *Departement Agama RI, Al-Hikmah*,
(Bandung : Cv Penerbit Diponegoro, 2010)
- Ahmad Idrus, Djen, *Peran Kepala Desa Kanjilo Dalam Memperdayakan Masyarakat Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa*, jurusan ilmu pilotik fakultas Ushuluddin, Filsafat dan politik (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015)
- Alamsyah, Anggriani, *Etika Politik*, Uin Alauddin Makassar Press 2012
- Asnudin, Andi, *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat*, Volume 7 nomor 4, *jurnal*, November 2009,
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTER/article/viewFile/598/518>
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social Lainnya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2007
- Beratha, I Nyoman, *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- David Marsh dan Gerry stoker, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, Nusa Media, 2010

- Intan, Salmah , *Sorotan Terhadap Gender dan Kontroversi Kepemimpinan Perempuan* (Makassar: Alauddin University press, 2013),
- Muhammad Isransyah, *kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan pembangunan di desa kota bangun seberang kabupaten kutai kartanegara, volume 2, nomer 1*, eJurnal ilmu pemerintahan, 2014
[http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/sitewp-content/uploads/2014/03/eJournal%20Muhammad%20Isransyah%20Jurnal%20\(03-07-14-04-34-16\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/sitewp-content/uploads/2014/03/eJournal%20Muhammad%20Isransyah%20Jurnal%20(03-07-14-04-34-16).pdf) 10 oktober 2016
- Maleong, Lexy, *metodologi penelitian kaulitatif*, (Bandung : Rosda Karya, 2010)
- Marselinus Ajang, *Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa Di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu*, volume 3 nomer 4, eJurnal ilmu pemerintahan, 2014
[http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/sitewp-content/uploads/2015/11/JURNAL%20\(11-18-15-02-51-16\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/sitewp-content/uploads/2015/11/JURNAL%20(11-18-15-02-51-16).pdf), 10 oktober 2016
- Novitasari Fika dan Sri Maryati, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Perkembangan Wilayah di Indonesia*, Volume 3 Nomor 2 Juli 2014, <http://sappk.itb.ac.id/jpwwk2/?p=1633>
- Nuraeni, siti, *Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa* (Bekasi: Jurnal Kybeman, Vol. 1 Maret)
- Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007,

Sudarni, *Politik Anggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015)

Sulaeha, *pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin Filsafat, dan Politik (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012)

Sugioto, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung :Alfabet. 2008

Tryono, Teguh, *Partisipasi Politik Pemilih Lansia Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkuta Kabupaten Luwu Timur*, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015).

Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2009

https://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/PP3406_%20Jalan.pdf, di akses 30 agustus 2016

LAMPIRAN

Wawancara kepala Desa Baraya Basuki Nomp



Wawancara masyarakat desa oleh bapak Judding



Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Baraya



Wawancara oleh Tokoh Masyarakat Desa Baraya, sekaligus Anggota BPD desa Baraya



Wawancara oleh tokoh pemuda Desa Baraya, Ketua Karang Taruna Desa

Baraya



BIODATA PENULIS



Muh Ismail lahir di Bangkeng Nunu pada tanggal 03 juni 1993 dari ayah Badiheng Dg Lalang dan Ibu Narti Dg Ke'nang. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di jalan Sultan Alauddin 2. Penulis telah berhasil menyelesaikan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar tepatnya di SDN 99 Tinggimaeng Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto selesai pada tahun 2006, dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Bontoramba dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bontoramba dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2012, dan mengambil jurusan Ilmu Politik di Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Program Strata Satu (S1).

Penulis juga aktif dalam dunia organisasi intra kampus yaitu KSR-PMI unit 107 UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2013 dan menjabat di kepengurusan sebagai anggota Diklatsar pada tahun 2014, dan PMII Cabang Makassar pada tahun 2012.